

Analisis Manajemen Kinerja Dinas Sosial dalam Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk Mendukung Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan Sosial di Kota Kotamobagu

Renata Olii¹, Arga Herdiansyah Laode², Rahelica Natasya Yambo³

¹ Prodi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Darma Kotamobagu, Indonesia

² Prodi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Darma Kotamobagu, Indonesia

³ Prodi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Darma Kotamobagu, Indonesia

Korespondensi: Enangolii2@gmail.com, laodearga50@gmail.com, rahelicanatasya@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Sept 1th, 2026

Revised Sept 29th, 2026

Accepted Oct 13th, 2026

Keyword:

Manajemen Kinerja; Dinas Sosial;
Data Tunggal Sosial Ekonomi
Nasional; Bantuan Sosial;
Ketepatan Sasaran.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif manajemen kinerja Dinas Sosial Kota Kotamobagu dalam pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai instrumen utama pendukung ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Permasalahan fundamental dalam penyelenggaraan program pengentasan kemiskinan sering kali bersumber pada sinkronisasi antara data administratif dengan dinamika kondisi faktual di lapangan. Ketidaksesuaian ini secara langsung memicu fenomena kesalahan inklusi (inclusion error) dan kesalahan eksklusi (exclusion error), yang bermuara pada tidak tepat sasaran distribusi bantuan. Menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif, studi ini mengedepankan analisis data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola DTSEN di Dinas Sosial Kota Kotamobagu, serta triangulasi menggunakan dokumen rekapitulasi data kemiskinan daerah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dari total 43.861 keluarga (terdiri dari 124.767 individu) yang terdata dalam sistem, masih terdapat 5.823 keluarga dalam status belum pemeringkatan dan 3.716 keluarga berstatus nonaktif. Tingginya angka kesalahan data lapangan diatasi melalui strategi pemutakhiran periodik yang diakselerasi setiap satu hingga tiga bulan sekali berdasarkan usulan dari pihak kelurahan. Dalam eksekusinya, manajemen kinerja Dinas Sosial bertindak sebagai fasilitator verifikasi berjenjang ke tingkat kementerian untuk program yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (seperti PKH, BPNT, dan PBIJK). Di saat yang bersamaan, Dinas Sosial juga berperan sebagai eksekutor langsung untuk intervensi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna menutup kesenjangan perlindungan sosial bagi kelompok rentan spesifik, termasuk bantuan pemakanan, sandang, dan alat bantu bagi 151 pemerlu pelayanan, serta perlindungan bagi korban bencana. Kesimpulan dari studi ini menegaskan bahwa efektivitas ketepatan sasaran bantuan sosial sangat bergantung pada sinergitas komunikasi data secara bottom-up antara kelurahan dan Dinas Sosial, serta perlunya peningkatan kapasitas verifikasi lapangan untuk mereduksi secara signifikan angka data yang belum terperingkat.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Program bantuan sosial merupakan salah satu pilar utama dalam kebijakan perlindungan sosial yang dirancang oleh negara untuk memberikan jaring pengaman ekonomi bagi kelompok masyarakat rentan dan miskin ekstrem. Dalam eksekusinya, efektivitas seluruh instrumen kebijakan ini bertumpu

pada satu fondasi yang sangat fundamental, yaitu kualitas, integritas, dan akurasi basis data kesejahteraan sosial yang digunakan sebagai rujukan penetapan sasaran (Santoso et al., 2023). Sayangnya, permasalahan yang secara konsisten dan berulang kali menghambat keberhasilan program pengentasan kemiskinan di Indonesia adalah fenomena asinkronisasi yang parah antara data administratif yang tercatat di server pemerintah dengan realitas sosio-ekonomi faktual yang terjadi di lapangan (Widyaningsih et al., 2023). Ketidaksesuaian ini mengakibatkan bantuan sosial sering kali salah sasaran; di mana masyarakat yang telah mencapai kemandirian ekonomi masih terus menerima bantuan, sementara keluarga yang terperosok ke dalam jurang kemiskinan baru justru tidak tersentuh oleh intervensi negara sama sekali (Simbolon et al., 2025; Pangera et al., 2025).

Ketidaktepatan sasaran akibat kegagalan sinkronisasi data ini tidak hanya berdampak pada inefisiensi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga berimplikasi luas terhadap kohesi sosial di tingkat akar rumput. Berbagai studi kontemporer menunjukkan bahwa distribusi bantuan yang tidak berlandaskan pada data mutakhir kerap memicu kecemburuan sosial dan konflik horizontal antarwarga (Pangera et al., 2025). Ketidaktepatan pendataan juga berkaitan dengan persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola bantuan sosial (Simbolon et al., 2025). Ketika warga miskin yang layak (*eligible*) mendapati diri mereka tereliminasi dari sistem secara sepihak, sementara kelompok yang lebih mampu justru terakomodasi akibat warisan data historis yang tidak pernah dievaluasi, maka legitimasi moral dari kebijakan bantuan sosial itu sendiri akan runtuh (Santoso et al., 2023; Pangera et al., 2025).

Untuk merespons problematika sistemik tersebut, pemerintah pusat terus melakukan reformasi dan transformasi tata kelola data kemiskinan, yang kini direpresentasikan melalui transisi menuju pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem pendataan yang terintegrasi ini diarahkan untuk mengurangi fragmentasi data sektoral yang tumpang tindih antar kementerian dan lembaga (Syamsu, 2025). Pentingnya integrasi tersebut sejalan dengan temuan Santoso et al. (2023), yang menunjukkan bahwa pengelolaan data kemiskinan di daerah masih menghadapi persoalan keterpaduan antarlembaga. DTSEN menuntut adanya pemutakhiran data yang progresif, berkelanjutan, dan berbasis pada kondisi faktual di tingkat lapangan, sehingga perubahan status ekonomi rumah tangga baik akibat kematian, perpindahan domisili, maupun dinamika pendapatan dapat segera direkam dan divalidasi oleh sistem (Widyaningsih et al., 2023; Santoso et al., 2023).

Dalam kerangka desentralisasi administratif, Dinas Sosial di tingkat kabupaten dan kota memegang peranan yang sangat sentral sebagai integrator sekaligus verifikator utama dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial. Santoso et al. (2023) menjelaskan bahwa pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS merupakan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota, tetapi masih menghadapi kendala administratif dan koordinasi. Manajemen kinerja dari instansi daerah ini sangat menentukan keberhasilan pengelolaan data tersebut. Kecepatan merespons anomali data, kemampuan mengoordinasikan perangkat kelurahan untuk melakukan verifikasi lapangan, serta kapasitas teknis dalam mengoperasikan sistem informasi menjadi aspek penting dalam mendukung pengelolaan data yang akurat (Tamrin & Zulkarnaini, 2023; Setiadi et al., 2024).

Meskipun literatur mengenai evaluasi program bantuan sosial telah banyak dipublikasikan, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu ditelaah terkait analisis manajemen kinerja dari perspektif operasional birokrasi, khususnya dalam fase transisi digitalisasi data tunggal. Penelitian terdahulu antara lain membahas dampak dan efektivitas bantuan sosial dalam mengurangi kemiskinan (Pangera et al., 2025), pelaksanaan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial (Santoso et al., 2023), serta efektivitas kerja pegawai dalam verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial (Tamrin & Zulkarnaini, 2023). Oleh karena itu, kajian yang secara khusus menelusuri mekanisme administratif internal, beban kerja pemutakhiran, dan dinamika verifikasi yang dialami administrator data dalam pengelolaan DTSEN masih perlu dikembangkan.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui analisis yang membedah manajemen kinerja Dinas Sosial Kota Kotamobagu dalam mengelola DTSEN secara empiris. Kajian ini tidak hanya memotret angka-angka statis dari profil kemiskinan, melainkan menelusuri alur pengelolaan data—mulai dari usulan di tingkat kelurahan, dinamika data yang belum memenuhi kriteria, rutinitas pemutakhiran periodik, hingga bagaimana Dinas Sosial merumuskan solusi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengatasi kendala pengelolaan data. Fokus pada proses verifikasi, validasi, koordinasi, dan pemutakhiran tersebut sejalan dengan persoalan yang ditemukan dalam penelitian Santoso et al. (2023).

Sementara itu, pemanfaatan sistem informasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran juga menjadi perhatian dalam penelitian Setiadi et al. (2024). Melalui pendekatan ini, realitas birokrasi dalam menjembatani kebijakan nasional dan dinamika lokal diharapkan dapat tergambar secara utuh dan komprehensif.

METODE PENELITIAN

Desain yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif Deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fenomena manajemen kinerja birokrasi dan sinkronisasi data kesejahteraan sosial melibatkan proses administratif, interaksi antarpelaksana, serta kendala dalam pelaksanaan kebijakan yang tidak cukup dijelaskan hanya melalui angka statistik. Penelitian Santoso et al. (2023) menunjukkan bahwa pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Semarang masih menghadapi kendala, seperti persoalan administrasi kependudukan, koordinasi, dan pelaksanaan verifikasi di lapangan. Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya memahami proses pengelolaan data serta hambatan yang dialami oleh pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, metode kualitatif deskriptif relevan untuk menggali pengalaman, menjelaskan proses, dan menyajikan gambaran mengenai realitas penerapan kebijakan sosial (Santoso et al., 2023; Tamrin & Zulkarnaini, 2023).

Strategi pengumpulan data dalam penelitian ini mengedepankan wawancara mendalam (in-depth interviews) kepada narasumber kunci, yakni pengelola DTSEN di lingkungan Dinas Sosial Kota Kotamobagu. Wawancara langsung digunakan untuk menggali pengalaman dan pengetahuan praktis para pelaksana yang berhadapan dengan sistem informasi serta proses pengelolaan data kesejahteraan sosial. Penelitian Tamrin dan Zulkarnaini (2023) mengenai efektivitas kerja pegawai Dinas Sosial dalam verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial di Kota Pekanbaru relevan dengan fokus penelitian ini, khususnya dalam memahami pelaksanaan tugas pegawai pada proses verifikasi dan validasi data. Melalui wawancara, penelitian ini dapat menggali informasi mengenai beban administratif pemutakhiran, mekanisme penyelesaian anomali data lapangan, serta langkah yang ditempuh Dinas Sosial ketika ditemukan ketidaksesuaian data (Tamrin & Zulkarnaini, 2023; Santoso et al., 2023).

Sebagai instrumen triangulasi untuk memvalidasi temuan dari proses wawancara, studi ini menyertakan analisis dokumen primer berupa Rekapitulasi DTSEN 3.2 Pemerintah Kota Kotamobagu. Dokumen internal ini digunakan untuk menelaah data demografi penerima bantuan, status pemeringkatan desil, pemetaan antarkecamatan, serta perbandingan pemanfaatan anggaran antara APBN dan APBD, sepanjang informasi tersebut tersedia dalam dokumen. Penggunaan dokumen sebagai sumber pembanding relevan dengan penelitian Santoso et al. (2023), yang mengkaji pelaksanaan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial serta persoalan keterpaduan data antarlembaga. Selain itu, Setiadi et al. (2024) membahas pemanfaatan sistem informasi pendataan bantuan sosial untuk mendukung peningkatan ketepatan sasaran. Seluruh temuan wawancara dan hasil analisis dokumen selanjutnya dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara naratif dan komparatif, serta penarikan kesimpulan yang didukung oleh hasil penelitian terdahulu (Santoso et al., 2023; Setiadi et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Demografi dan Pemeringkatan DTSEN

Berdasarkan Rekapitulasi DTSEN 3.2, terdapat 43.861 keluarga yang mencakup 124.767 individu di Kota Kotamobagu. Data tersebut dikelompokkan berdasarkan desil kesejahteraan, mulai dari Desil 1 hingga Desil 10. Namun, masih terdapat 5.823 keluarga berstatus belum pemeringkatan dan 3.716 keluarga berstatus nonaktif.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan DTSEN masih menghadapi tantangan dalam memastikan kelengkapan dan validitas data. Oleh karena itu, pemutakhiran dan verifikasi diperlukan agar penentuan penerima bantuan sosial sesuai dengan kondisi masyarakat. Sebaran data DTSEN menunjukkan bahwa Kecamatan Kotamobagu Barat memiliki jumlah terbesar, yaitu 14.495 keluarga, diikuti Kotamobagu Selatan sebanyak 11.849 keluarga, Kotamobagu Timur 11.137 keluarga, dan Kotamobagu Utara 6.380 keluarga. Perbedaan jumlah tersebut menunjukkan perlunya pembagian beban kerja dan koordinasi yang proporsional antara Dinas Sosial dan pemerintah kelurahan. Wilayah

dengan jumlah data lebih besar memerlukan perhatian khusus dalam proses verifikasi dan pemutakhiran.

Permasalahan Akurasi Data DTSEN

Permasalahan utama dalam pengelolaan DTSEN adalah data yang belum terperingkat dan berstatus nonaktif. Sebanyak 5.823 keluarga belum memiliki pemeringkatan, sedangkan 3.716 keluarga berstatus nonaktif. Kondisi ini berpotensi menyebabkan masyarakat yang memenuhi kriteria tidak terakomodasi dalam penetapan penerima bantuan sosial. Data nonaktif dapat berkaitan dengan ketidaksesuaian administrasi kependudukan, seperti kesalahan NIK, perbedaan penulisan nama, dan keterlambatan pelaporan kematian. Dengan demikian, peningkatan akurasi data membutuhkan koordinasi antara Dinas Sosial, pemerintah kelurahan, instansi kependudukan, dan masyarakat.

Pemutakhiran dan Verifikasi Data

Dinas Sosial Kota Kotamobagu melakukan pemutakhiran data setiap satu hingga tiga bulan berdasarkan usulan pemerintah kelurahan. Usulan tersebut diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Dinas Sosial sebelum diteruskan kepada kementerian untuk proses penetapan akhir. Mekanisme ini menunjukkan bahwa manajemen kinerja Dinas Sosial berperan dalam koordinasi, verifikasi, dan fasilitasi pemutakhiran data. Namun, kewenangan penetapan penerima bantuan yang bersumber dari APBN berada pada pemerintah pusat. Akibatnya, keterlambatan pemrosesan data dapat menyebabkan perbedaan antara kondisi masyarakat di lapangan dan data yang digunakan dalam penyaluran bantuan.

Pelaksanaan Bantuan Sosial melalui APBN dan APBD

Dinas Sosial memfasilitasi program bantuan yang bersumber dari APBN, meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK). Pelaksanaannya bergantung pada proses verifikasi, kuota, serta penetapan dari pemerintah pusat. Selain itu, Dinas Sosial memanfaatkan APBD untuk memberikan bantuan kepada kelompok rentan yang membutuhkan penanganan khusus. Bantuan tersebut meliputi pemakanan, sandang, alat bantu bagi 151 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, serta bantuan bagi korban kebakaran. Kedua skema tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial menjalankan fungsi fasilitasi bantuan nasional sekaligus memberikan respons terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat daerah. Namun, efektivitasnya tetap memerlukan data yang akurat, koordinasi lintas instansi, dan pemutakhiran secara berkelanjutan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, manajemen kinerja Dinas Sosial Kota Kotamobagu dalam pengelolaan DTSEN dilakukan melalui pemutakhiran data secara berkala setiap satu hingga tiga bulan. Upaya ini bertujuan menjaga kesesuaian data dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pengelolaan tersebut mencakup 43.861 keluarga yang terdata dalam sistem DTSEN.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah terdapat 5.823 keluarga berstatus belum pemeringkatan dan 3.716 keluarga berstatus nonaktif. Kondisi ini berpotensi menghambat ketepatan sasaran bantuan sosial. Selain itu, kewenangan Dinas Sosial dalam program bantuan bersumber APBN terbatas pada proses pengusulan dan verifikasi, sedangkan penetapan akhir dilakukan oleh pemerintah pusat. Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Sosial memanfaatkan APBD untuk memberikan bantuan kepada kelompok rentan, termasuk 151 pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan korban kebakaran. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur kelurahan, koordinasi lintas instansi, serta sinkronisasi data kependudukan diperlukan untuk meningkatkan akurasi DTSEN dan mendukung ketepatan sasaran penerima bantuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiarto, R. (2023). Inovasi penyaluran jaminan sosial tepat sasaran melalui kebijakan pengelolaan anggaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pemanfaatan aplikasi "Cek Bansos". Prosiding Seminar Nasional Unimus.
- Pangera, A. M. F. H. T., Kamaruddin, S. A., & Awaru, A. O. T. (2025). Dampak dan efektivitas program bantuan sosial dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6(3), 3580–3592.

- Sandy, F., Rintaria, & Ningrum, P. K. (2025). Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam menanggulangi kemiskinan (Studi kasus di Kota Tanjungpinang Kelurahan Sei Jang). *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(4), 23–43.
- Santoso, A., Kurniawati, E., & Dhani, A. U. (2023). Kajian pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 17(1), 79–94.
- Sari, N. F., & Rfs, H. T. (2023). Kinerja Dinas Sosial dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Pekanbaru (Studi kasus fakir miskin). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 533–540.
- Setiadi, D., Julianto, R., & Siswanto, R. (2024). Optimalisasi sistem informasi pendataan bantuan sosial berbasis web untuk meningkatkan ketepatan sasaran. *Abdi Akommedia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2).
- Simbolon, L. L., Aulia, N., Sihombing, O. K. J., Siboro, S. R. J., & Boot, R. (2025). Analisis ketidaktepatan sasaran bantuan sosial di Kota Medan: Studi literatur terhadap implementasi kebijakan. *Netizen: Journal of Society and Business*, 2(1), 292–300.
- Syamsu, J. (2025). Analisis kebijakan bantuan sosial terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di era digital Kabupaten Sijunjung. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(3), 7687–7693.
- Tamrin, L., & Zulkarnaini. (2023). Efektivitas kerja pegawai Dinas Sosial dalam verifikasi dan validasi data penerima dana bantuan sosial di Kota Pekanbaru. *Diklat Review: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Pelatihan*, 7(1).
- Widyaningsih, D., Ruhmaniyati, & Toyamah, N. (2023). Urgensi memutakhirkan data terpadu kemiskinan secara berkelanjutan dan berkualitas: Pembelajaran dari studi kasus di enam daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 31(2), 179–200.